

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku, Laporan Penelitian, Jurnal dan Makalah

- A Baso Ence, Irianto, 2008, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi: Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Alumni, Bandung.
- Agusmidah, 2010, *Dinamika & Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Arend Lijphart, Arend, 1999, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, Yale University Press, London.
- Asshidiqie, Jimly, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.
- , 2006, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Depertemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djohansah, J., 2001, "Pengadilan Niaga" di Pengadilan Ruddhy Lontoh (ED.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Fuady, Munir, 2010, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 1987, *Hukum Keberadaan Adat*, Fajar Agung, Jakarta.
- Hadi, M, 2008, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan)*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.
- Haharahap, M. Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Hans Kelsen, Hans, 1961, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York.
- Hartanto, J. Andy, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Hoff, Jerry, Diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, 2000, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, Tanutas, Jakarta.
- H. Syaiful Tency, Mulida dan Ibnu Elmi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang.

- Huda, Ni'matul, 2007, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta.
- Latif, Abdul dkk., 2009, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta.
- , 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*, Total Media, Yogyakarta.
- Ibrahim, Jonny, 2006, *Teori & Metode Penelitian Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- MD, Mahfud, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, RajaGrafindo Persada.
- Manik, Edward, 2012, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muljadi, Karni, Gunawan Widjaja, 2004, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Nainggolan, Bernad, 2011, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitur, Kreditur, dan Pihak-Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan*, Alumni, Bandung.
- Nating, Imran, 2004, *Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurus dan Pembersihan Harta Pailit*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Prawiromidjojo, Soetojo, 1986, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- , 1990, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya.
- , dan Asis Safioedin, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung.
- Puspa, Yan Pramadya, 2010, *Kamus Hukum Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Radjaguguk, Erman, "Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan", di dalam Ruddhy Lontoh (ED.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 2001, Alumni, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.

- Sastrawidjaja, Man, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alamni, Bandung.
- Satrio, J. 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, PT.Aditya Bakti, Bandung.
-, 1998, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siahaan, Maruarar, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2009, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan)*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuadji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sumiarni, Ending, 2004, *Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta.
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Syamsudin, M, 2012, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, Kencana, Jakarta.
- Usman, Racmadi, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Tim Penyusun, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku VI, Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta.
- Yahya, M. Harahap, 1993, *Kedudukan Kewenangan dalam Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Yani, Ahmad, Gunawa Widjayadi, 2002, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahjono, Padmo, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Waluto, Bernadette, 1999, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Widjaja, Gunawan, 2004, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Pemilik, Pengurusan, Perwakilan dan Pemberian Kuasa dalam Sudut Pandang KUH Perdata*, Kencana, Jakarta.

Wignjosuebrotto, Soetandyo, 2002, *Hukum, Pradigma, Metode dan Masalahnya*, Elsam: HuMa, Jakarta.

Abdullah, Saiful, “Perbandingan Model Pengujian Konstitusional antara Indonesia dengan Amerika Serikat”, *mfile.narotama.ac.id/.../JURNAL%20KONSTITUSI*, Diakses tanggal 20 Februari 2018.

Agustine, Viana, Oly, “Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan”, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 6, Nomor 1, April 2017, hlm. 23.

Basri, Hasan, “Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Putusan Pailit”, *Tesis*, Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, Tidak dipublikasi, Yogyakarta. 2011.

Faradz, Haedah, “Tujuan dan Maafaat Perjanjian Perkawinan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8, Nomor 3, September 2008, hlm. 9.

Hardani, Sofia, “Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia”, *An-Nida Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 40, Nomor 2, Juli-Agustus, 2015, hlm. 19.

Simamora, Janpatar, “Sinkonisasi Kewenangan *Judicial Review* di Indonesia”, *Tesis*, Program Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, Tidak dipublikasi, Yogyakarta, 2011.

S Pratiwi, Cekli, “Wajah Undang-Undang Pasca Uji Materil Mahkamah Konstitusi (Menggugat Pemegang Kekuasaan Legislasi, Mendorong Tegaknya Konstitusi dan Terwujudnya The Rule of Law)”, *Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*, Volume 3, Nomor 1, Juni, 2010.

Yunus, Ahsan, 2012, “Prinsip Kebebasan Hakim Memutus Perkara”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 2, Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 31.

b. Internet

Arif F, Zudan, “Dua Syarat Agar Perjanjian Kawin Bisa Dicapil”, *Dukcapil.kemendagri.go.id*, Diakses Tanggal 9 Mei 2018.

Baker, Anita, “Kekawatiran Pebisnis Terhadap Ketidak Pastian Hukum di Indonesia”, https://www.kompasiana.com/blue_anita/kekhawatiran-pebisnis-terhadap-ketidakpastian-hukum-di-indonesia_54f3d3ba745513932b6c810e, Diakses Tanggal 10 Mei 2018.

- Edendi, “Mahkah Agung Republik Indonesia-Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”, <http://pn-jakartapusat.go.id/>, Diakses Tanggal 7 Juni 2018.
- Farhan, “5 Point SE Kemenag Soal Pencatatan Perjanjian Kawin”, Bismasislam.kemenag.go.id, Diakses Tanggal 9 Mei 2018.
- Hermawati, Erni, “Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perjanjian Kawin dalam Undang-Undang”, <http://business-law.binus.ac.id/2016/11/30/putusan-mahkamah-konstitusi-terkait-perjanjian-kawin-dalam-undang-undang-p>, Diakses Tanggal 26 Januari 2018.
- Herno, Agus Yudha, ”Problematika Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, <https://fh.unair.ac.id/urgensi-pemahaman-perjanjian-kawin-dan-waris-pasca-putusan-mk-departemen-hukum-perdata-melaksanakan-pengabdian-masyarakat-di-mojokerto/>, Diakses Tanggal 3 Juli 2018.
- Hutapea, Hotman Paris, 2018, “Hukum Kepailitan Adalah Terkejam Didunia”, https://www.youtube.com/results?search_query=hukum+kepailitan+terkejam+didunia, Diupload Di Bulan Maret 2018, Diakses Tanggal 7 Juni 2018.
- Indah, Septya Rahcmayanti, Muchmmad Bakri dkk, “Tinjauan Yuridis Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2369>, Diakses Tanggal 26 Januari 2018.
- Makmur, Syafruddin, “Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multi Kultural”, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2387/1801>, Diakses Tanggal 7 Juni 2018.
- MD, Mahfud, “Mengawal Arah Politik Hukum: Dari Prolegnas Sampai *Judicial Review*”, www.mahfudmd.com, Diakses Tanggal 5 Maret 2018.
- MR25, “Plus Minus MK tentang Perjanjian Kawin”, Hukumonline.com, Diakses Tanggal 29 April 2018.
- Nee, “Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK, Belum Ada Perjanjian Yang Dicatat”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58fb56c4a23d3/pasca-putusan-mk--belum-ada-perjanjian-kawin-yang-dicatatkan>, Diakses Tanggal 10 Mei 2018.
- Qorib, Fathan,” Surat Ederan Kementerian Agama”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cdfc6a2df7e5-poin-se-kemenag-soal-pencatatan-perjanjian-perkawinan>, diakses Tanggal 4 April 2018.

Ronny, “Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia”, <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/peraturan/detail/129/Surat-Edaran-47225876DUKCAPIL-Tentang-Pencatatan-Pelaporan-Perjanjian-Perkawinan>, Diakses Tanggal 4 April 2018.

Titik, T. Triwulan, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Yuniarti, “Urgensi Pemahaman Perjanjian Kawin dan Waris Pasca Putusan MK Departemen Hukum Perdata Melaksanakan Pengabdian Masyarakat di Mojokerto”, <https://fh.unair.ac.id/urgensi-pemahaman-perjanjian-kawin-dan-waris-pasca-putusan-mk-departemen-hukum-perdata-melaksanakan-pengabdian-masyarakat-di-mojokerto/>, Diakses Tanggal 1 Mei 2018.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 7).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4443).

c. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-VIII/2015.

d. Wawancara

Fatchurroman, M, 2018, Perjanjian Harta Bersama Dibuat Dalam Proses Pailit dan PKPU, *Wawancara*, Semarang, 9 April.

Hawani, Nur, 2018, Cara Membuat Pembuatan Perjanjian Kawin Yang Dibuat Selama Perkawinan, *Wawancara*, Padang, 2 Mei.

Isra, Saldi, 2018, Tanggapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, *Wawancara*, Jakarta, 8 Mei.

- Juhri, 2018, Konfirmasi Perjanjian Pemisahan Harta Bersama Yang Dibuat Dalam Proses Pailit dan PKPU, *Wawancara*, Medan, 7 Mei.
- Malik, Abd, 2018, Perjanjian Perkawinan Dibuat Selama Perkawinan, *Wawancara*, Yogyakarta, 27 April.
- Nuryahyah, Ali, 2018, Konfirmasi Perjanjian Pemisahan Harta Bersama Yang Dibuat Dalam Proses Pailit dan PKPU, *Wawancara*, Makassar, 7 Mei.
- Qosim, 2018, Perjanjian Perkawinan Dibuat Selama Perkawinan, *Wawancara*, Yogyakarta, 27 April.
- Rosmaliah, 2018, Perjanjian Perkawinan Harta Bersama Dibuat Selama Perkawinan, *Wawancara*, Yogyakarta, 9 Mei.
- Sainal, Mhd, 2018, Perjaian Harta Harta Bersama Dibuat Dalam Proses Pailit dan PKPU, *Wawancara*, Semarang, 9 April.
- Saputera, Hendri, 2018, Format Pembuatan Perjanjian Pemisahan Harta Bersama Yang Dibuat Selama Perkawinan, *Wawancara*, Padang, 25 April 2018.
- Surya, Adi, 2018, Format Pembuatan Perjanjian Pemisahan Harta Bersama Yang Dibuat Selama Perkawinan, *Wawancara*, Padang, 25 April.
- Suswanto, Edy, 2018, Perjanjian Harta Bersama Dibuat Dalam Proses Pailit dan PKPU, *Wawancara*, Semarang, 9 Mei.
- Zulkarnain, 2018, Komentar Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Membolehkan Perjanjian Harta Bersama Dibuat Selama Perkawinan, *Wawancara*, Makassar, 28 April.